

Nature and Meaning of the Environment for Welfare

M Chairul Basrun Umanailo, Annisa Retrofilia Umanailo, Askar Daffa Sophia Umanailo

Keywords: kesejahteraan, lingkungan, interaction, individu, masyarakat

1. INTRODUCTION

Masyarakat dan lingkungan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Masyarakat Perilaku dan tindakan manusia dalam kehidupan keseharian berpengaruh pada kualitas lingkungan dimana ia tinggal. Berkaitan dengan masyarakat yang tidak bisa dilepaskan dari lingkungan, perspektif sosiologis tidak dapat dipungkiri menjadi sangat penting dalam kajian tentang lingkungan¹. Selain bersinggungan dengan kondisi geografis, biologis, teknologi, maupun ekonomi, kajian lingkungan tidak dapat dilepaskan dari fenomena sosial budaya sebuah masyarakat. Inilah mengapa kajian lingkungan selalu menjadi kajian yang interdisipliner. Adorno menyatakan bahwa semua teori tentang kemajuan sejak masa pencerahan menafsirkan sejarah sebagai proses yang melibatkan manusia dan alam dalam suatu pertentangan satu sama lain. Sejarah dipandang sebagai pembebasan manusia dari cengkeraman alam². Manusia pada kenyataannya hanya dapat membebaskan diri dari alam dengan cara menaklukkan alam kepadanya. Manusia mengatasi ketergantungan dari alam dicapai dengan penguasaan yang terorganisir³. Lebih lanjut dikemukakan oleh Adorno bahwa bertentangan dengan harapannya, manusia yang ingin membebaskan diri dengan menguasai alam justru pada jaman ini menjadi objek dari penguasaan itu. Alih-alih memberikan emansipasi (pembebasan) bagi manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadikan manusia sebagai objek dari penguasaannya sendiri⁴. Kritik ini diteruskan oleh Herbert Marcuse yang menyatakan manusia modern sebagai manusia berdimensi satu (one dimensional man). Menurut Marcuse, manusia adalah makhluk yang menurut kodratnya mendambakan kebahagiaan dan berhak juga atas kebahagiaan. Perwujudan kebahagiaan sama sekali tergantung pada pemuasan kebutuhan-kebutuhannya yang sebenarnya dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, jaman modern ini mempunyai kemungkinan obyektif untuk merealisasikan pemuasan ini, antara lain karena pekerjaan berkat otomatisasi sudah hampir tidak lagi bersifat menghinakan martabat manusia. Hal ini adalah ciri khas yang menonjol dalam masyarakat industri modern, yaitu peranan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rasionalitas dalam jaman kita ini adalah rasionalitas teknologis^{5,6,7}. Segala sesuatu dipandang dan dihargai sejauh dapat dikuasai, digunakan, diperalat, dimanipulasikan, dan ditangani. Dalam pandangan teknologis, instrumentalisasi merupakan suatu istilah kunci. Mula-mula cara berpikir dan bertindak ini hanya dipraktekkan dalam hubungan dengan alam saja, tetapi lama kelamaan diterapkan juga pada manusia dan seluruh lapangan sosial. Bukan saja benda-benda, alam dan mesin-mesin diperalat, dan dimanipulasikan, tetapi hal yang sama berlangsung juga diseluruh wilayah politik, sosial, dan kultural. Manusia dan masyarakat tidak terkecuali merupakan dari penguasaan dan manipulasi teknologis⁸.

2. LITERATURE REVIEW

Lingkungan merupakan salah satu dari sedikit kekuatan yang telah terbukti digdaya dalam mengintegrasikan bangsa dan manusia dari berbagai ras ke dalam satu kesatuan hubungan global yang lebih konstruktif⁹. Hampir secara aklamasi, semua pemangku kepentingan utama dalam sebuah masyarakat politik negara, civil society dan economic

society menyepakati lingkungan sebagai salah satu inti utama konstitusi global. Hampir setiap bangsa menempatkan lingkungan sebagai bahasa bersama dalam mata rantai politik yang menghubungkan sebuah bangsa dengan komunitas global^{1011,12}. Lingkungan dengannya, telah menjadi ideologi humanisme di antara bangsa komunitas dan individu dari sembarang ras, ideolog, kebudayaan dan tingkatan ekonomi. Ia menjadi titik episentrum paling netral paling kuat, tetapi sekaligus paling subyektif dari masyarakat manusia. Di dalam isu lingkungan melekat kepentingan subyektif makhluk manusia: masa depan bersama dari bukan saja sebuah bangsa tetapi setiap komunitas dan individu pembentuk bangsa¹³¹⁴. Di Indonesia segala kekayaan alam termasuk tanah, sumberdaya hayati dan air dikuasai oleh negara seperti yang diatur dalam UUD 1945. Sangat jelas bahwa pemerintah mewakili negara, bertanggung jawab menjamin semua kekayaan alam tersebut dikelola dengan baik dengan menjamin kekayaan yang dihasilkan dapat digunakan sebaik baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Setelah konstitusi, peraturan paling penting yang berkaitan dengan pengelolaan dan distribusi manfaat sumber daya alam yaitu TAP MPR IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Secara umum, hal ini dapat dilihat sebagai sebuah pencapaian dan pernyataan eksplisit MPR, dimana yang paling penting dan dibutuhkan pemerintah untuk memiliki komitmen terhadap pembaruan pengelolaan sumber daya alam dan pembaruan agraria. Hal ini mengharuskan negara untuk mengkaji, mencabut dan merevisi semua peraturan perundangundangan mengenai tanah dan sumber-sumber agraria dan pada saat yang sama menyelesaikan konflik agrarian yang ada saat ini secara adil dan lestari. UUPA No 5 tahun 1960 dan UU Kehutanan no 41 tahun 1999 merupakan dua perundangundangan paling penting yang dalam perundangan hirarki perundangan tanah dan sumber daya alam menduduki urutan kedua setelah Konstitusi. Kedua aturan tersebut secara langsung mengatur pengelolaan dan distribusi sumber daya alam. Kondisi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia saat ini sangat beragam. Di beberapa tempat terdapat komunitas masyarakat yang menanam hutan produktif disekitar tempat tinggal mereka dengan tanaman buah-buahan, kopi, coklat dan dicampur dengan tanaman kayu-kayuan yang dikenal dengan. Hutan seperti ini menyediakan banyak jasa lingkungan, menyerupai hutan alam Namun dengan sedikit lebih rendah dalam kandungan keanekaragaman hayatinya dibandingkan dengan hutan alam. Masalah lingkungan hidup merupakan kenyataan yang harus dihadapi oleh semua manusia yang ada di muka bumi dewasa ini. Masalah lingkungan hidup adalah merupakan masalah yang kompleks dan harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan multidisipliner¹⁵. Industrialisasi merupakan keberhasilan pembangunan untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi, akan tetapi industrialisasi juga mengandung resiko lingkungan, yang memberi resiko pula pada kehidupan manusia.

Persoalan lingkungan adalah bukan persoalan teknis dan bilogis semata, tapi menjadi persoalan sosial yang harus didekati dengan kajian sosial-budaya masyarakat. Dengan kajian sosiologi lingkungan, permasalahan lingkungan dapat dikaji secara lebih komprehensif.

Pembangunan, apa pun penjelasan ideologisnya, merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara sengaja (intervention) dan terencana dalam rangka mendapatkan hasil yang lebih baik dari kondisi kehidupan sebelumnya¹⁶. Kondisi kehidupan yang lebih baik seperti apa yang diinginkan dalam proses perubahan itu, kata yang tidak pernah absen dari telinga setiap warga negara adalah kehidupan masyarakat yang sejahtera. Oleh sebab itu, perdebatan tentangnya berkembang menjadi perdebatan ideologis

tentang bagaimana cara pencapaian perubahan dan hasil dari proses perubahan itu sendiri, yang berhubungan dengan kualitas kehidupan manusia. Kalau perubahan yang diharapkan lebih baik itu adalah sejahtera sebagai sebuah kondisi yang dapat dirasakan oleh masyarakat, pertanyaan tentangnya adalah berdasarkan basis apa hidup sejahtera itu diletakkan, apakah sejahtera itu ditunjukkan oleh basis individu atau basis komunitas, atau bahkan keduanya¹⁷. Rasa aman sekurangnya menjadi salah satu indikator yang menjadikan seseorang merasa sejahtera hidupnya. Singkat kata, di level mana kesejahteraan itu hendak diletakkan dalam sebuah keputusan politik, apakah hendak diletakkan pada kebijakan masyarakat (communitarian policy) atau kebijakan negara (public and social policy). Artinya, rasa hidup sejahtera itu hendak dipikirkan atas konseptualisasi masyarakat itu sendiri sesuai dengan lingkungan sekitarnya, atau rasa hidup sejahtera itu ditentukan oleh keputusan politik negara yang indikatornya pun ditentukan oleh negara¹⁸. Bisa saja terjadi, apa yang dirasakan oleh negara bahwa masyarakat kurang sejahtera oleh karenanya perlu intervensi program dan proyek pembangunan, akan tetapi apa yang dirasakan masyarakat bisa berbeda kebutuhannya¹⁹. Misalnya masyarakat membutuhkan rasa aman dimana negara diharapkan mampu menjamin ketenteraman, tidak sering terjadi pencurian ternak peliharaannya, akan tetapi intervensi pembangunan justru menawarkan kredit ternak dengan bunga yang rendah. Masyarakat mengartikan sejahtera sangat kualitatif, yakni ada jaminan keamanan untuk mengamankan harta sapi mereka sehingga hidupnya tenang, akan tetapi negara justru sebaliknya, yakni penambahan ternak sapi mereka yang diperoleh secara kredit sebagai indikasi semakin sejahtera hidup mereka. Sejahtera ditangkap sebagaimana memahami kemiskinan, yang diartikan karena ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan. Pertanyaannya, apakah ketidaksejahteraan masyarakat itu identik dengan kemiskinan? Kelihatannya ada asumsi menyamakan keduanya, meskipun kemiskinan itu dapat merupakan salah satu indikasi ketidaksejahteraan. Akhir dari semua jawaban ini adalah peningkatan pendapatan perkapita, meskipun indikasi mutakhir tidak hanya dilihat pendapatan perkapita, melainkan juga terpenuhinya kebutuhan hidup minimum seperti kemampuan mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan dan pemenuhan nutrisi. Guna pemenuhan kebutuhan minimum ini, pada akhirnya masyarakat juga harus memiliki sejumlah uang yang cukup untuk itu. Indikator batas garis kemiskinan yang digunakan secara universal adalah 2 \$. Orang yang pendapatannya kurang dari 2\$ perhari disebut orang miskin. Kalau ukuran kemiskinan seperti ini digunakan, maka orang berpendapatan rendah di negara maju bisa saja dianggap kaya di negara berkembang. Namun tidaklah demikian bahwa ukuran angka kemiskinan tersebut di atas hanyalah diperuntukkan negara berkembang dan negara belum berkembang. Ilmu pengetahuan telah menempatkan standar ganda dalam pengukuran kemiskinan antara negara maju dan berkembang²⁰. Demikian halnya jika ukuran ini digunakan untuk melihat standar pemenuhan kebutuhan hidup per keluarga, ini menjadi sangat problematik. Menstandarisasi pengukuran angka kemiskinan tidaklah mudah, yang semuanya ini membuka ruang perdebatan untuk memahami konsep kemiskinan. Perdebatan itu sekurangnya menempatkan paham tentang kemiskinan absolut (universal standart) dan kemiskinan relative. Kalau kemiskinan absolut dan relatif masih menekankan pada ukuran materiil, meskipun pada kemiskinan relative orang miskin diukur dengan cara membandingkan dengan orang, kelompok lain atau orang yang tinggal di wilayah tertentu dengan wilayah lain, namun ada yang meletakkan konsep kemiskinan berdasarkan atas pandangan yang bukan bersifat materiil²¹. Miskin dilihat dari kemampuan kreativitas seseorang atau lembaga untuk melakukan kerja guna

pemenuhan kebutuhan hidup, meskipun hal ini tidak harus mengabaikan kebutuhan dasar²². Walaupun pendapatan perkapita seseorang itu rendah, dapatkah serta merta mereka dikatakan tidak sejahtera hidupnya? Kesejahteraan masyarakat, istilah yang sering digunakan dalam terminologi akademik adalah kesejahteraan sosial, mengalami pergeseran dalam pemahaman dan penggunaannya.

Kesejahteraan sosial itu menunjuk kondisi kehidupan yang baik, terpenuhinya kebutuhan materi untuk hidup, kebutuhan spiritual (tidak cukup mengaku beragama tetapi wujud nyata dari beragama seperti menghargai sesama), kebutuhan sosial seperti ada tatanan (order) yang teratur, konflik dalam kehidupan dapat dikelola, keamanan dapat dijamin, keadilan dapat ditegakkan dimana setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, tereduksinya kesenjangan sosial ekonomi. Midgley mengkonseptualisasikan dalam tiga kategori pencapaian tentang kesejahteraan, yakni pertama, sejauh mana masalah sosial itu dapat diatur²³. Kedua, sejauh mana kebutuhan dapat dipenuhi dan ketiga, sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat diperoleh. Semuanya ini bisa diciptakan dalam kehidupan bersama, baik ditingkat keluarga, komunitas maupun masyarakat secara luas.

3. CONCLUSION

Masyarakat dan lingkungan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. masyarakat Perilaku dan tindakan manusia dalam kehidupan keseharian berpengaruh pada kualitas lingkungan dimana ia tinggal. Kerusakan lingkungan telah menjadi ancaman yang sangat serius di semua belahan bumi dan telah dirasakan dengan adanya perubahan iklim dan efek-efek yang ditimbulkannya. Di Indonesia, lingkungan yang mengalami kerusakan yang parah dapat dilihat pada penggundulan hutan, polusi udara, maupun pencemaran sungai. Bahwa kajian lingkungan adalah interdisipliner, Dickens (1996: 29-34) berpendapat tentang pentingnya pembagian kerja para intelektual untuk mengatasi problema kerusakan lingkungan tersebut. Tiga ranah ilmu pengetahuan biologis, fisik dan sosial memiliki keterkaitan dan problema lingkungan harus menjadi kajian di tiga ranah ilmu pengetahuan ini. Tingkat kepuasan dan kesejahteraan adalah dua pengertian yang saling berkaitan. Tingkat kepuasan merujuk pada individu atau kelompok, sedangkan tingkat kesejahteraan mengacu pada komunitas atau masyarakat luas. Tingkat kesejahteraan meliputi pangan, pendidikan, kesehatan, kadang juga dikaitkan dengan kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbebasan dari kemiskinan dan sebagainya. Kesejahteraan merupakan representasi yang bersifat kompleks karena multidimensi, mempunyai keterkaitan antar dimensi dan ada dimensi yang direpresentasikan. Perumusan tentang batasan antara substansi kesejahteraan dan representasi kesejahteraan ditentukan oleh perkembangan praktik kebijakan yang dipengaruhi oleh ideologi dan kinerja negara yang tidak lepas dari pengaruh dinamika pada tingkat global.

Di Indonesia, konsep kesejahteraan merujuk pada konsep pembangunan kesejahteraan sosial, yakni serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia. Sebagai sebuah proses untuk meningkatkan kondisi sejahtera, istilah 'kesejahteraan' sejatinya tidak perlu pakai kata 'sosial' lagi, karena sudah jelas menunjuk pada sektor atau bidang yang termasuk dalam wilayah pembangunan sosial. Sektor 'pendidikan' dan 'kesehatan' juga termasuk dalam wilayah pembangunan sosial dan tidak memakai embel-embel 'sosial' atau 'manusia'..

Reference

1. Wael A, Umanailo MCB. GERAKAN BUPOLO MEMBACA SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BURU Pendahuluan. *Al-Muaddib*. 2020;5(1).
2. Romlah SN, Pratiwi RD, Indah FPS, Umanailo MCB. Qualitative study factors triggering gay characteristics in gay groups in Palmerah District West Jakarta. In: *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*. ; 2020.
3. Bertens H. *Literary Theory: The Basics*.; 2017. doi:10.4324/9780203488836
4. Kanto S, Wisadirana D, Chawa AF, Umanailo MCB. Change in community work patterns. *Proc Int Conf Ind Eng Oper Manag*. 2020;0(March):2496-2502.
5. Zuhroh N, Wisadirana D, Kanto S, Umanailo MCB, Mardiyono M. SELEBRITY OF STUDENT ROLE IN CAMPUS. *Adv Soc Sci Res J*. 2020. doi:10.14738/assrj.71.7622
6. Umanailo MCB. Measuring Poverty for the Community. Presented at the: 2020. doi:http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3530258
7. Umanailo MCB. Development of science and technology towards the formation of participatory spaces. *Proc Int Conf Ind Eng Oper Manag*. 2020;0(March):2524-2528.
8. Yusuf S, Umanailo MCB, AR N. RELASI KEPALA DESA DAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PEMANFAATAN DANA DESA DI KECAMATAN NAMLEA. *SOSIOGLOBAL J Pemikir dan Penelit Sociol*. 2020;4(2).
9. Umanailo MCB. Fungsi Nilai, Moral, Keadilan, Ketertiban Dan Kesejahteraan Masyarakat. In: *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. 1st ed. Namlea: FAM PUBLISHING; 2014. https://www.researchgate.net/publication/339697634.
10. Mu'adi S, Maksum A, Hakim ML, Umanailo MCB. Transfer of function agricultural land. *Proc Int Conf Ind Eng Oper Manag*. 2020;0(March):2568-2574.
11. Lionardo A, Kurniawan R, Umanailo MCB. An effectiveness model of service policy of building permit (IMB) based on a green spatial environment in Palembang city. In: *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*. ; 2020.
12. Wargadinata W, Maimunah I, Zulfiqar S, Tahir B, Chairul M, Umanailo B. Arabic Creative and Participative Learning: In Search of a New Way of Language Learning by "El Jidal Reborn" Youth Community in Malang. *Int J Adv Sci Technol*. 2020;29(8s):4319.
13. Ervina A, Zulmi D, Ariesta R, Aridawarni Y, Aminah A, Umanailo MCB. The Relationship of Patterns Use of Time and Income Family with Juvenile Delinquency in Junior High School Students at Lebak Distric. *Int J Sci Technol Res*. 2019;8(10). http://www.ijstr.org/final-print/oct2019/.
14. Apriyanto M, Umanailo MCB. Decrease polyphenols, ethanol, lactic acid, and acetic acid during fermentation with addition of cocoa beans inoculum. *Int J Sci Technol Res*. 2019;8(10).
15. Umanailo MCB. REDUCE THE MULTI PARTY FOR THE STABILITY OF NATIONAL DEVELOPMENT. Presented at the: 2020. doi:http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3530256
16. Umanailo MCB. *Kalesang Village Program*.; 2019. doi:http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3461837
17. Gross DS, Bertens H. The Idea of the Postmodern: A History. *World Lit Today*. 1995. doi:10.2307/40151833
18. Bertens H. *The Idea of the Postmodern*.; 2003. doi:10.4324/9780203359327
19. Umanailo MCB. *Politics of Education*.; 2019. doi:http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3461858

20. Bertens P, Lee SW. Network of Evolvable Neural Units: Evolving to Learn at a Synaptic Level. *arXiv*. 2019.
21. Umanailo MCB. *MASYARAKAT BURU DALAM PERSPEKTIF KONTEMPORER (Kajian Kritis Perubahan Sosial Di Kabupaten Buru)*.; 2015.
22. Levine R. Chapter 12 Finance and Growth: Theory and Evidence. *Handb Econ Growth*. 2005. doi:10.1016/S1574-0684(05)01012-9
23. Ciais P, Sabine C, Bala G, et al. The physical science basis. Contribution of working group I to the fifth assessment report of the intergovernmental panel on climate change. *Chang IPCC Clim*. 2013. doi:10.1017/CBO9781107415324.015